

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 16 Maret 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.co.id	Rabu, 16 Maret 2022	Dukung Pusat Persemaian Modern untuk IKN Nusantara, Kementerian PUPR RI Bangun Embung Mentawir	<p>Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) dalam salah satu rangkaian agenda kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin-Selasa (14-15/3/2022) meninjau Pusat Persemaian Modern (Nursery Center) IKN Nusantara di kawasan Bukit Bangkirai, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/401036/dukung-pusat-persemaian-modern-untuk-ikn-nusantara-kementerian-pupr-ri-bangun-embung-mentawir</p> <p>https://independensi.com/2022/03/15/kementerian-pupr-bangun-embung-mentawir-dukung-pengembangan-pusat-persemaian-modern-untuk-ikn-nusantara/</p> <p>https://www.industry.co.id/read/103812/bangun-embung-mentawir-kementerian-pupr-dukung-pengembangan-pusat-persemaian-modern-untuk-ikn-nusantara</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/2760185/klhk-persemaian-mentawir-dukung-rehabilitasi-lahan-di-areal-ikn</p> <p>https://mitrapol.com/2022/03/15/bangun-embung-mentawir-kementerian-pupr-dukung-pengembangan-pusat-persemaian-modern-untuk-ikn/</p> <p>https://www.jpnn.com/news/kementerian-pupr-bangun-embung-ini-untuk-mendukung-pembibitan-pohon-di-kawasan-ikn</p> <p>https://kumparan.com/kumparanbisnis/pupr-garap-embung-mentawir-ikn-nusantara-bakal-punya-pusat-persemaian-modern-1xgncjcsnfj</p>
2	Beritasatu.com	Rabu, 16 Maret 2022	PUPR Pastikan Rusun Mahasiswa di Riau Miliki Fasilitas Lengkap	<p>Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menuntaskan pembangunan rumah susun (rusun) Sekolah Tinggi Agama Islam HM Lukman Edy (STAlLe) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Rusun senilai Rp17,9 miliar ini sudah memiliki fasilitas lengkap.</p> <p>https://www.beritasatu.com/ekonomi/902793/pupr-pastikan-rusun-mahasiswa-di-riau-miliki-fasilitas-lengkap</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/15/103000421/jadi-asrama-plus-rusun-mahasiswa-di-riau-ini-dilengkapi-meja-belajar</p>

Judul	Pembangunan IKN Bisa Selesai dalam 20 Tahun	Tanggal	16 Maret 2022
Media	Media Indonesia, Halaman 10		
Resume	PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek sangat besar dan berat. Prosesnya tidak mungkin berjalan dalam waktu singkat. IKN baru akan sepenuhnya hidup seperti kota-kota besar lain di Tanah Air pada 15 hingga 20 tahun ke depan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.		

Pembangunan IKN Bisa Selesai dalam 20 Tahun

Rab, 16 Mar 2022



Presiden Joko Widodo. Dok. Biro Pres Presiden

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek sangat besar dan berat. Prosesnya tidak mungkin berjalan dalam waktu singkat. IKN baru akan sepenuhnya hidup seperti kota-kota besar lain di Tanah Air pada 15 hingga 20 tahun ke depan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.

“Ini kan sebuah pekerjaan raksasa. Ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan mudah. Ini pekerjaan rumit. Kita butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan,” ujarnya.

Untuk tahap awal, lanjut Kepala Negara, pembangunan akan fokus pada penghijauan melalui pengembangan pusat persemaian dan pendirian sejumlah infrastruktur dasar.

Dengan sudah terbentuknya otorita serta terpilihnya kepala dan wakil kepala lembaga tersebut, Jokowi meyakini tahap awal pembangunan bisa segera dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk dapat berkolaborasi menyukseskan program besar tersebut.

“Sekali lagi, ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, BUMN, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa ini. Semua kekuatan yang ada harus betul-betul kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Nusantara,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Surakarta itu juga mengatakan istana kepresidenan akan dibangun di titik tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Di sini titik istananya, tempat yang tertinggi dari permukaan laut, kira-kira 80 meter di atas permukaan laut. Ini yang paling tinggi di sini sehingga bisa melihat seluruh penjuru kanan dan kiri,” ujar Jokowi saat meninjau titik lokasi Istana di IKN.

Terkait dengan rencana peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara pada 2024, Presiden mengatakan pemerintah akan mengkaji ulang rencana tersebut.

Jokowi ingin terlebih dulu melihat progres pembangunan dalam waktu dekat sebelum memfi nalkan kegiatan tersebut.

Judul	Presiden Perkirakan Pembangunan IKN Nusantara Selesai 15-20 Tahun	Tanggal	16 Maret 2022
Media	Investor Daily, Halaman 14		
Resume	PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek sangat besar dan berat. Prosesnya tidak mungkin berjalan dalam waktu singkat. IKN baru akan sepenuhnya hidup seperti kota-kota besar lain di Tanah Air pada 15 hingga 20 tahun ke depan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.		

Presiden Perkirakan Pembangunan IKN Nusantara Selesai 15-20 Tahun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu sekira 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai. Pasalnya, menurut Presiden, membangun IKN Nusantara merupakan "pekerjaan yang raksasa besarnya" dan rumit.

Oleh Novy Lumanauw

“Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang antara 15-20 tahun baru bisa diselesaikan,” kata Presiden dalam video terbaru di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Presiden berharap proses pembangunan tersebut akan semakin terlihat perkembangannya menyusul pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Dhony Rahajoe pada Kamis (10/3) lalu.

Menurut Presiden, nantinya lembaga tersebut yang akan merancang perencanaan lebih terperinci terkait pembangunan IKN Nusantara, termasuk di dalamnya *Detail Engineering Design* (DED).

“Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detil, entah itu DED dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti. Tapi yang paling penting memang infrastruktur dasar itu harus segera dimulai,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta Otorita IKN dapat bekerja lincah dan fleksibel untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Dia mengatakan, sebanyak 80% dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, akan berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Semua bisa dilakukan. Saya kira otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa



Joko Widodo

mendapatkan pendanaan dari skema-skema yang ada,” ujarnya.

Beberapa sumber pendanaan non-APBN yang dapat dipertimbangkan, antara lain, kata Presiden, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership*, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.

Adapun sebesar 19-20% dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun akan berasal dari APBN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bermalam pada Senin (14/3). Mengenakan jaket merah bermotif G20 yang dipadu sarung bermotif kotak, Presiden Jokowi keluar dari tenda tempatnya bermalam pada sekitar pukul 22.15 WITA.

Mengetahui tenda Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tak berada jauh dari tendanya, Presiden Jokowi datang

menghampiri tenda Ketua MPR RI. Keduanya melakukan perbincangan ringan hingga satu persatu menteri yang ikut bermalam di IKN pun keluar dari tendanya masing-masing.

“*Alhamdulillah*, udaranya sejuk kalau malam Bapak Presiden, cuaca juga cerah jadi terlihat bulan purnama dan bintangnya,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahilil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang kesemuanya tampak mengenakan pakaian santai, kecuali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang masih mengenakan pakaian kerja.

Kebijakan yang Tepat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah tepat karena kemampuan Kota Jakarta untuk menyangga dan menyediakan layanan sebagai IKN semakin tidak memadai.

“Pertumbuhan dan laju modernitas zaman menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis sehingga membutuhkan karakteristik Ibu Kota Negara yang mampu memfasilitasi tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif. Selain, mempunyai daya saing sebagai *‘smart, green, dan beautiful city’*,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/3).

Hal itu dikatakan Bamsuet usai sarapan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki

Hadimoljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahilil Lahadalia dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebelum meninggalkan Titik Nol IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia menjelaskan, usulan pemindahan IKN di luar Pulau Jawa sebenarnya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pindah dari Jakarta ke Palangkaraya.

Menurut dia, Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan Ibu Kota Negara pindah ke Jonggol dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 1 Tahun 1997.

“Namun, hingga kini usulan pemindahan tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi sangat tepat, seiring dengan beban Jakarta yang semakin berat dan tidak lagi mampu ditopang daerah penyangga di sekitar Jakarta,” katanya.

Bamsuet menilai membangun IKN Nusantara bukan persoalan sederhana karena dibutuhkan fokus perhatian dari segenap pemangku kepentingan.

Menurut dia, saat ini payung hukum pembangunan IKN Nusantara adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

“Berdasarkan rencana induk Bappenas, pembangunan IKN Nusantara dimulai sejak 2022 hingga 2045. Banyak pihak mengkhawatirkan pembangunan IKN Nusantara akan mangkrak di tengah jalan, tentu kita semua tidak ingin hal itu terjadi,” ujarnya.

Judul	AIR BAKU IBU KOTA NEGARA - Lahan Bendungan Sepaku Akan Selesai Sesuai Target	Tanggal	16 Maret 2022
Media	Kompas, Halaman 11		
Resume	Dalam pembahasan awal, kemungkinan air yang dialirkan ke IKN Nusantara akan diolah menjadi air minum. Artinya, air yang keluar dari keran sudah layak minum. Namun, Harya menyatakan, hal itu masih di bahas lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		

AIR BAKU IBU KOTA NEGARA

Lahan Bendungan Sepaku Masih Digugat Kesultanan

SEPAKU, KOMPAS — Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura masih menggugat kepemilikan lahan Bendungan Sepaku Semoi, salah satu sumber air bersih ke Ibu Kota Negara Nusantara. Kendati demikian, pemerintah optimistis pembangunan bisa selesai tepat waktu, awal 2023.

Pihak kesultanan mengklaim seluruh lahan seluas 378 hektar untuk proyek bendungan itu milik mereka. Pangeran Hario Adiningrat dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Chandra Wijaya, Selasa (15/3/2022), menyebutkan, ada tiga tahapan pembebasan lahan Bendungan Sepaku Semoi. "Securahnya tinggal validasi. Hanya saja itu bisa kita lakukan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung," ujar Chandra ketika dihubungi.

Sebelumnya, pihak kesultanan sudah menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, tidak dikabulkan. Selanjutnya, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan kembali tidak dikabulkan.

Menurut Chandra, putusan

Mahkamah Agung atas kasasi itu kemungkinan keluar bulan ini. "Begitu kita terima putusan MA dan hasilnya sama dengan sebelumnya, pembebasan lahan selesai paling lama satu bulan," lanjut Chandra.

Berdasarkan catatan Kantor Pertanahan Kabupaten PPU, pembebasan lahan tahap pertama direncanakan 93,8 hektar. Sekitar 88 hektar lahan sudah selesai dibebaskan. Lahan itu saat ini dibangun menjadi bangunan fisik bendungan. Adapun tahap kedua seluas 140 hektar dan tahap ketiga 107,9 hektar belum dibebaskan karena persoalan hukum tersebut.

Sesuai target

Meski terkendala pembebasan lahan, pemerintah optimistis pembangunan fisik Bendungan Sepaku Semoi selesai tepat waktu. Mereka yakin persoalan hukum itu bisa diselesaikan dan dimenangkan pemerintah.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto mengatakan, saat ini pembangunan bendungan sudah mencapai 40 persen. Itu terlihat dari bangunan pelimpah yang sudah berdiri, tubuh bendungan yang sudah ditimbun, dan pembuatan pengelak aliran air. Adapun jalan masuk menuju pendopo bendungan

sekitar 500 meter sudah selesai dicor.

"Target untuk selesai fisik bendungan di awal 2023, antara Januari-Februari. Target pengendalian bendungan selesai di pertengahan 2023," ujar Harya.

Menurut rencana, Bendungan Sepaku Semoi mampu mengalirkan air 2.500 per detik. Sebanyak 500 liter per detik akan disalurkan ke Kota Balikpapan yang saat ini masih defisit air baku. Adapun 2.000 liter per detik akan dijadikan sumber air bagi IKN Nusantara.

Dalam pembahasan awal, kemungkinan air yang dialirkan ke IKN Nusantara akan diolah menjadi air minum. Artinya, air yang keluar dari keran sudah layak minum. Namun, Harya menyatakan, hal itu masih dibahas lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Dari 2.000 liter per detik untuk IKN, nantinya berapa persen untuk warga dan apakah juga air minum, itu kami belum bicara detail. Seharusnya warga juga terakomodasi," kata Harya.

Radimin (34), warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, berharap rencana pemerintah membangun IKN di se-



KOMPAS/DOONISUS REYNALDO TRIWIDORO

Seorang pekerja melintas di sisi Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Bendungan ini menjadi salah satu unsur penting penyuplai kebutuhan air di Ibu Kota Negara Nusantara.

kitar tempat tinggalnya berdampak nyata terhadap suplai air ke warga. Sejak menjadi warga transmigran pada 1970-an, ia menampung air hujan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus.

Untuk air minum, ia meng-

andalkan air isi ulang yang ia beli Rp 8.000 per galon. "Kalau sudah tidak ada hujan, kita harus beli Rp 60.000 per tandon. Sebulan bisa empat kali beli kalau kemarau," katanya.

Harapan serupa juga disampaikan sejumlah transmigran

yang ditemui saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan serta seluruh gubernur atau perwakilan di Indonesia, saat berkunjung ke titik nol IKN Nusantara, Senin lalu. Senin malam itu, Presiden dan rombongan

an berkemah di lokasi IKN.

Selain soal air bersih, warga lokal berharap mereka tidak tersisih dari pembangunan IKN. Mereka juga ingin merasakan tinggal di ibu kota dengan berbagai fasilitasnya.

(IDO/CIP)